

Seksi Tindak Pidana Khusus

Program yang dilaksanakan seksi tindak Pidana Khusus sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

A. Penyelidikan

- 1) dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kantor Pengadilan Agama Kota Tidore Kepulauan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2012/2013, masih dalam proses penyelidikan.
- 2) dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Pasar RUM tahun anggaran 2013 di Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kota Tikep, telah dihentikan.
- 3) dugaan penyalahgunaan anggaran Pekerjaan Konstruksi paket Banpro Kota Tidore – Kota Tidore Kepulauan senilai Rp 6.628.700.000,- (enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (SATKER PKPAM) Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-01/S.2.11/Fd.1/04/2015, tanggal 15 April 2015, telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
- 4) dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah lapangan soasio tahun 2012 dan tahun 2013 serta pekerjaan pembangunan timbunan lapangan soasio tahun anggaran 2014 yang dibiayai dengan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012, 2013 dan 2014, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan. Telah dihentikan.
- 5) pembangunan jalan maba gotowasi tahun anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur, berdasarkan Surat perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : PRINT-004/S.2.11/Fd.1/09/2015, tanggal 08 September 2015, masih dalam proses penyelidikan.
- 6) dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 dan 2013, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-005/S.2.11/Fd.1/09/2015 tanggal 08 September 2015, masih dalam proses penyelidikan.

B. Penyidikan

1. “Pembangunan Talut Penahan Gelombang dan Timbunan Tanah di Goto Tidore, yang bersumber dari APBD/P Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara” Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : PRINT-349/S.2.11/Fd.1/09/2013 tanggal 16 September 2013.
2. dugaan tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012, 2013 dan tahun 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2011, 2012 dan tahun 2013, sesuai surat perintah Nomor Print- 003/S.2.11 / Fd.1/ 09/ 2015 tanggal 08 September 2015.

C. Penuntutan

1. Perkara atas nama tersangka LUTH MUHAMMAD Diduga melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Subsidiar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan

atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Perkara atas nama HIDAYAT ABUBAKAR SYAH Diduga melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Subsidiar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Perkara atas nama terdakwa Muhammad Yusup Diduga melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Subsidiar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Perkara atas nama Iskandar Hi Hasan, Diduga melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Subsidiar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kasasi)

D. Eksekusi

Perkara yang telah dilakukan eksekusi :

Perkara atas nama terdakwa Sufro Karim dan Hi Adnan Fihir.

**DATA PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PIDANA KHUSUS
DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016**

I. Rencana kegiatan dan realisasi kinerja tahun 2015

NO	NAMA KEGIATAN	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Capaian Kegiatan	KETERANGAN
1.	Penyelidikan	3	5	150 %	
2.	Penyidikan	2	1	50 %	
3.	Penuntutan	2	4	200 %	
4	Eksekusi	2	6	150 %	

II. Rencana kinerja 2016

NO	NAMA KEGIATAN	Rencana Kegiatan	Capaian Kegiatan yang diharapkan	KETERANGAN
1.	Penyelidikan	4	100 %	
2.	Penyidikan	4	100 %	
3.	Penuntutan	6	100 %	
4	Eksekusi	4	100 %	